

BAB VI **KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

Rekrutmen Penyelenggara Pemilu merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu, karena selain berdampak pada legitimasi hasil Pemilu. juga berpengaruh terhadap tahapan lainnya. Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, sesuai dengan teori proses rekrutmen, pada tahap *Sourcing Process*, KPU Kota Solok dan PPS telah menyampaikan informasi pengumuman penerimaan KPPS secara terbuka. Namun informasi tersebut hanya sebatas menjalankan aturan dan sekedar pengumuman yang ditempelkan. Sementara sumber eksternal dari proses rekrutmen KPPS salah satunya berasal dari saudara PPS karena memang tidak ada larangan bagi PPS dalam merekrut saudaranya untuk menjadi anggota KPPS. Akibatnya informasi penerimaan KPPS disampaikan langsung kepada saudara, teman dan orang yang dikehendaki serta mendorong mereka untuk melakukan pendaftaran KPPS karena juga didorong oleh adanya orientasi uang berupa honor yang akan diterima KPPS.

Dengan demikian ada kecenderungan informasi yang disampaikan beredar disekitar orang-orang terdekat PPS, memicu awal terjadinya nepotisme dalam perekrutan KPPS. Pendaftaran yang berpotensi didominasi oleh saudara PPS dan adanya rasa pesimis masyarakat terhadap proses rekrutmen membuat masyarakat tidak mau mendaftar menjadi KPPS karena mereka yakin yang akan lulus nantinya adalah orang-orang terdekat PPS dan berdampak pada pemenuhan kuota KPPS. Oleh sebab itu agar kuota KPPS terpenuhi, PPS mendatangi rumah-rumah

warga dan meminta mereka untuk mendaftar sebagai KPPS dengan resiko bahwa PPS terpaksa menerima apa adanya kemampuan yang dimiliki calon anggota KPPS tersebut karena fokus pada terpenuhinya jumlah kuota. Dengan demikian wajar apabila banyak terjadi kesalahan pengisian Formulir C1 oleh KPPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok.

Kemudian pada tahap *Selection Process*, proses seleksi KPPS hanya berpedoman pada persyaratan administrasi dan juga wawancara formalitas dan bersifat subyektif karena tidak adanya dasar penilaian yang kuat seperti tes tertulis dalam menentukan kemampuan KPPS. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa adanya tes tertulis dalam seleksi KPPS sangat penting dilakukan agar mendapatkan KPPS sesuai dengan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. Standar seleksi yang dilakukan dalam proses rekrutmen KPPS sangat rendah sekali dan tidak sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan jika dibandingkan dengan seleksi yang dilakukan terhadap PPK dan PPS, sehingga mempermudah PPS melakukan nepotisme dalam rekrutmen KPPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai tanggapan negatif dari masyarakat terhadap saudara PPS yang tidak berkompeten namun lulus menjadi anggota KPPS yang berakibat pada banyaknya terdapat kesalahan pengisian Formulir C1 pada TPS dimana saudara PPS ditempatkan sebagai KPPS.

Dari hasil penelitian bahwa selain *Sourcing Process* dan *Selection Process*, ternyata *User Process* dalam hal ini pelaksanaan bimtek dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara juga mempengaruhi terjadinya kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok. Terbukanya peluang

nepotisme dalam tahap *Sourcing Process* dan *Selection Process*, ditambah dengan tidak maksimalnya pelaksanaan bimtek dari segi waktu, materi bimtek yang masih kurang dalam bentuk contoh soal dan simulasi yang kurang efektif, terbatasnya jumlah KPPS yang mengikuti bimtek, tidak kondusifnya ruang bimtek menambah buruknya kualitas KPPS yang dihasilkan. PPS tidak melakukan penyesuaian kemampuan terhadap posisi KPPS yang tepat akibat bimtek yang tidak maksimal sehingga penentuan posisi KPPS hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota KPPS.

Berdasarkan hasil penelitian, asumsi awal bahwa kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS pada Pemilu 2019 di Kota Solok terjadi karena regulasi atau aturan yang mengatur rekrutmen dan seleksi KPPS tidak berdasarkan tes tertulis, ditambah tidak adanya larangan dalam melakukan perekrutan terhadap saudara dan adanya orientasi uang, diduga dimanfaatkan oleh PPS untuk melakukan rekrutmen KPPS berdasarkan nepotisme terbukti benar. Namun dari hasil penelitian juga diketahui bahwa nepotisme berawal dari tidak tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat dan tidak tepat sasaran yang dilakukan pada tahap *Sourcing Process* serta tidak maksimalnya pelaksanaan tahap *User Process* yang diwujudkan dalam bimtek dan simulasi yang diikuti oleh KPPS.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil analisis permasalahan, maka dirumuskan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam proses rekrutmen KPPS, agar dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas sehingga kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS dapat diminimalisir pada pelaksanaan Pemilu berikutnya. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil analisis permasalahan, maka dirumuskan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam meminimalisir terjadinya nepotisme dalam proses rekrutmen KPPS pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengumuman penerimaan KPPS, selain ditempel pada tempat strategis dan ruang publik juga perlu dilakukan sosialisasi oleh KPU Kota Solok dan jajarannya sebelum pengumuman penerimaan dibuka dan saat pengumuman pendaftaran KPPS berlangsung. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah (BPKSDM), Camat, Lurah, Aparatur Sipil Negara, Sekolah Menengah Atas, Guru, Perguruan Tinggi, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi lainnya serta pada pertemuan-pertemuan masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi tersebar secara merata ke semua lapisan masyarakat dan tepat sasaran

sehingga rekrutmen KPPS diikuti oleh orang yang berkualitas dan dapat mengantisipasi terjadinya nepotisme dalam proses rekrutmen KPPS.

2. Untuk Pemilu kedepan, perlu dilakukan perbaikan standar seleksi KPPS dengan memberikan tes tertulis dan pedoman wawancara yang jelas. Namun perlu pertimbangan dan perencanaan yang benar-benar matang mengenai tes tertulis seperti apa yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan KPPS. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh KPPS dan juga mengantisipasi terjadinya nepotisme dalam proses rekrutmen KPPS. Untuk tes tertulis dilakukan dengan memberikan soal-soal simulasi tata cara penghitungan suara di TPS sedangkan pedoman wawancara dibuatkan oleh KPU Kota Solok. Dalam menentukan tempat pelaksanaan tes tertulis KPU Kota Solok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah-sekolah serta dilakukan serentak pada tiap kelurahan. Agar tes tertulis dan wawancara dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perpanjangan waktu terhadap proses rekrutmen KPPS.
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan bimtek baik itu dari segi waktu, materi, jumlah peserta, ruang bimtek dan narasumber. Kemudian dari hasil pelaksanaan bimtek diharapkan PPS dapat menempatkan KPPS pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya, agar pada saat simulasi KPPS dapat fokus dengan pekerjaan sesuai dengan posisi masing-masing sehingga dapat dengan mudah melakukan penyesuaian terhadap

pekerjaannya di TPS. Hendaknya bimtek dikemas secara menarik namun mudah dipahami dengan dilengkapi alat kerja KPPS di TPS.

6.2.2 Saran Teoritis

Walaupun rekrutmen KPPS ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang telah ditemukan dan dibuktikan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, maka untuk mendalami rekrutmen KPPS yang dilakukan secara terbuka sebagaimana temuan penelitian ini menjadi parameter untuk baiknya sebuah kualitas pemilihan baik itu Pemilu ataupun Pilkada, bisa diteliti lebih lanjut terkait dengan rekrutmen terbuka KPPS di Pilkada 2020.

